

ANALISIS BENTUK PERLAWANAN *PROTEST VOTERS* DALAM PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

Oleh : *Relsan Mandela (20130520247)*

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Pemilukada Serentak di Bantul pada tahun 2015 memunculkan paradigma pesimistis dikalangan rakyat, dikarenakan kekuatan petahana telah mengakar sejak tahun 1998 di tataran eksekutif Bantul, selain itu petahana memiliki Sumber daya politik yang terdiri dari empat (4) hal, petahana di usung oleh partai pemenang Pileg 2014, Petahana memiliki saham terbesar pada salah satu surat kabar yakni Kedualatan Rakyat, hasil survei menunjukkan petahana memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat sebesar 70 %, Petahana menduduki jabatan eksekutif di Bantul selama 15 Tahun sehingga dapat menggerakkan ASN. Tetapi ketetapan KPUD Bantul menempatkan petahana sebagai pihak yang tidak mendapat amanah rakyat, hal ini disebabkan karena perpecahan di internal partai pengusung petahana dan munculnya *Protest Voters*. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab lahirnya *protest voters* dan peranan *protest voters* pada Pemilukada Bantul 2015. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis tokoh-tokoh penggerak *protest Voters* dan Partai Politik pengusung Petahana yakni PDIP. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menentukan informan melalui metode *snowball sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian Kehadiran *protest voters* disebabkan terjadinya perbedaan pandangan kader-kader partai pengusung petahana yakni PDIP dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung PDIP pada Pemilukada Bantul 2015, sebagian kader-kader PDIP yang berada di struktural atau non struktural tidak menghendaki partai kembali mengusung petahana dikarenakan aspirasi masyarakat Bantul menginginkan adanya perubahan. Kekecewaan yang sampai pada titik puncaknya melahirkan tindakan perlawanan dari internal partai untuk menolak keputusan partai dan tidak mendukung calon yang diusung partai dan memilih mendukung paslon lain dengan membentuk relawan jas merah. Kelahiran Jas Merah merupakan bentuk transformasi kader-kader partai pengusung petahana yang memberikan perlawanan karena partai tidak mengakomodir aspirasi kader, Relawan Jas Merah hadir untuk mendukung Paslon penantang petahana dengan tujuan runtuhnya rezim petahana dan untuk memecah suara petahana pada Pemilukada, keanggotaan Jas Merah semua berasal dari kader-kader partai pengusung petahana yang menginginkan perubahan rezim, keberadaan *protest voters* yang beranggotakan kader-kader Partai pengusung petahana terbukti efektif karena mampu melemahkan kekuatan petahana dari dalam, indikasi keberhasilan *protest voters* faktor terbesar runtuhnya rezim petahana disebabkan kehadiran *protest voters* dalam mengakusisi suara petahana pada pemilukada 2015.

Kata Kunci : *Protest Voters*, Pemilukada Bantul, Relawan Jas Merah

PENDAHULUAN

Perubahan politik yang sangat fundamental terjadi di Indonesia dengan diawali runtuhnya rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah orde baru mengkebiri seluruh kekuatan politik diluar kelompok soeharto. Dominasi presiden Soeharto menciptakan kondisi pemerintahan berjalan otoriter, presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satu pun institusi/lembaga negara yang dapat menjadi pengawas presiden dan mencegahnya melakukan penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*).¹ Makna perubahan sistem politik sentralistik menuju sistem politik desentralistik yakni pemerintah pusat memberikan wewenang kepada provinsi-provinsi yang ada untuk menciptakan ruang demokrasi politik lokal menjadi terbuka dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan aspirasi rakyat di daerah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah menentukan secara langsung kepala daerah dan wakilnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan babak baru dalam demokratisasi di Indonesia yang kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, terakhir Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan optimisme membaiknya kualitas kepemimpinan di daerah, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menciptakan ruang partisipasi bagi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya sesuai dengan amanat UUD 1945 tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan (demokrasi parlementer).² Proses demokratisasi di daerah sudah berjalan dalam kurun waktu tidak kurang dari satu dasawarsa, namun seiring berjalannya waktu terdapat fenomena yang menarik. Salah satu masalah yang sering muncul dalam proses Pemilihan Kepala Daerah adalah menguatnya sentimen primordial yang lebih terikat pada persamaan etnis, agama, ikatan darah dan berbagai bentuk sifat kedaerahan lainnya. Munculnya masalah ini lebih disebabkan karena karakter masyarakat yang ada di daerah beragam sehingga mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat. Beberapa variabel seperti latar belakang etnis, status sosial

¹ Andrew Heywood. 2013. "*Politik*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 137

² Irtanto.2008."*Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 149

ekonomi, golongan dan agama dapat menciptakan suatu polarisasi pilihan politik. Pilihan regenerasi model kekerabatan ini jelas merupakan cermin betapa kita masih mempraktikkan model demokrasi tradisional.³

Penelitian kali ini bertujuan menjadikan proses Pemilikada Serentak di Kabupaten Bantul sebagai obyek penelitian, dengan mengangkat isu analisis kekalahan petahana dalam pemilukada bantul. Pemilukada serentak 9 Desember 2015 telah menggugurkan dinasti politik yang sudah dibangun oleh Drs. HM. Idham Samawi sejak tahun 1998 dengan kalahnya Hj. Sri Surya Widati yang merupakan istri dari Drs. HM. Idham Samawi sekaligus Petahana pada pemilukada serentak tahun 2015 kemarin. Kekalahan yang diderita petahana dalam Pemilukada Bantul memutar balikan hipotesis dari seluruh pengamat politik yang menganggap petahana akan kembali duduk menjabat sebagai bupati Bantul periode 2016-2021 bahkan beberapa anggapan yang muncul penantang petahana yakni Drs.H Harsono yang sekarang menjabat sebagai bupati bantul, diawal kemunculannya sempat dipandang sinis saat awal kali kemunculannya mendaftar sebagai peserta Pilkada. Bahkandituding sebagai calon 'boneka', alias pelengkap bagi rivalnya Sri Surya Widati-Misbakhul Munir.⁴

Kekalahan petahana pada pemilukada bantul juga mengejutkan banyak pihak, pasalnya petahana dinilai memiliki sejumlah sumber daya politik dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitornya diantaranya adalah *pertama*, petahana memperoleh keunggulan dari jumlah alokasi partai mengukung petahan yang berada di parlemen Bantul yakni sebanyak 23 kursi yang berasal dari PDI-P 12 kursi, NasDem 2 kursi, Golkar 5 kursi, dan PPP 4 kursi.⁵ Sedangkan kompetitor petahana hanya memiliki jumlah dukungan sebanyak 15 kursi dengan rincian Gerindra 5 kursi, PKB 4 kursi, PKS 4 kursi dan Demokrat 1 kursi.⁶ *Kedua* kemunculan sosok calon penantang petahana dinilai terlalu memaksakan dan menimbulkan perpecahan di dalam internal Koalisi Merah Putih di Bantul yang menyebabkan PAN keluar dari koalisi dan memilih abstain serta pendaftaran Suharsono yang terjadi pada menjelang akhir pendaftaran lebih

³ Akbar mahendra. 2014. “Budaya Politik Patrimonialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jeneponto” Skripsi, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Hasanudin. Makasar. Hal. 8-9

⁴ <http://www.merdeka.com/peristiwa/suharsono-dari-tudingan-calon-boneka-hingga-menang-pilkada-bantul.html> edisi 10 desember 2015 diakses pada tanggal 2 oktober 2016 pukul : 16.00 WIB

⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2015/08/25/pilkada-bantul-harsono-halim-nomor-1-ida-munir-nomor-2> edisi 25 agustus 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 22.00 WIB

⁶ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/656160-calon-bupati-bantul-tepis-tudingan-calon-boneka> edisi 2 agustus 2015 diakses pada tanggal 7 oktober 2016 pukul 22.00 WIB

tepatnya dua jam pada hari terakhir pendaftaran yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul. *Ketiga*, berdasarkan survey elektabilitas yang dilakukan FMIPA UGM dengan jumlah responden sebanyak 1022 menempatkan petahana pada keunggulan 69,40 persen dan dua kandidat lainnya yakni Harsono hanya mendapatkan 18,10 persen serta Untoro yang mendapatkan 11,70 persen sedangkan 0,80 persen responden memilih tidak memilih.⁷ *Keempat*, sebagai Sebagai orang yang pernah duduk di pemerintahan, petahana memiliki potensi menggaet bawahan, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggalang dukungan. Hal itu sudah terbukti dalam catatan pelanggaran yang dibuat Panwaslu Bantul. Panwaslu Bantul, mencatat ada 16 ASN (aparatur sipil negara) yang tidak netral, memihak salah satu pasangan.⁸ *Kelima*, Petahana diuntungkan dengan memiliki satu media cetak surat kabar lokal di jogja yakni Harian Kedaulatan Rakyat (KR) yang diekola dan dipimpin oleh lingkungan keluarga petahana, dengan rincian Idham Samawi selaku mantan Bupati Bantul dengan periode kepemimpinan selama 2 periode sekaligus suami dari calon Bupati nomor 2 Hj. Sri Surya Widati adalah pemilik alias komisaris PT BP Kedaulatan Rakyat, sedangkan Gun Nugroho Samawi yang tidak lain kakak kandung Idham Samawi menjabat Direkrut Utama PT BP Kedaulatan Rakyat.⁹

Sejumlah sumber daya politik yang dimiliki petahana dirasa cukup untuk melanjutkan suksesi kepemimpinan petahana pada Pemilu 2015, akan tetapi realitanya dinasti petahana sejak 1998 diputus pada Pemilu 2015, gerakan perlawanan politik yang berasal dari internal Partai pengusung petahana yakni PDIP menjadi faktor kunci sebagai antithesis untuk membendung keunggulan-keunggulan petahana. Perpecahan yang terjadi bersumber dari kekecewaan kader-kader internal PDIP terhadap sikap dan keputusan partai yang tidak demokratis karena tidak mengakomodir suara-suara yang berasal dari akar rumput partai namun justru lebih mementingkan kepentingan suatu golongan. Kondisi tersebut menjadi latar belakang perlawanan politik yang ditunjukkan oleh kader-kader partai yang menamakan diri sebagai kader pro perubahan untuk menolak memenangkan petahana dan berupaya untuk mengugurkan rezim petahana. Perlawanan tersebut sampai pada titik puncaknya saat kader-kader pro perubahan

⁷ <http://jogja.tribunnews.com/2015/06/18/sri-surya-widati-misbakhul-munir-diusulkan-jadi-pasangan-idam> edisi 18 juni 2015 diakses pada tanggal 2 oktober 2016 pukul 19.00 WIB

⁸ <http://m.metrotvnews.com/read/2015/10/02/437011> edisi 2 oktober 2015 diakses pada tanggal 2 oktober 2016 pukul 20.00 WIB

⁹ <http://jaring.id/id/pilkada/dari-properti-ke-pelat-merah/> edisi 29 maret 2016 diakses pada 7 oktober 2016 pada pukul 22.00 WIB

membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan relawan Jas Merah yang bertujuan untuk memenangkan kompetitor petahana pada Pemilu Bantul 2015. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlawanan *protest voters* pada Pemilu Bantul 2015 serta mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi gagalnya petahana dalam Pemilu Bantul 2015.

KAJIAN PUSTAKA

Perubahan politik pasca reformasi menjadikan sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang desentralistik yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Konsekuensi dari semua itu antara lain adanya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Dipilihnya sistem Pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mengakomodir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan Pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.¹⁰

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powell (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokratis apabila:¹¹ (1) Menggunakan Mekanisme Pemilihan Umum, (2) Terjadi Rotasi Kekuasaan, (3) Rekrutmen Terbuka, (4) Akuntabilitas Publik. Sementara itu Kualitas demokrasi di daerah dalam Pilkada Langsung akan berjalan dengan baik dan berkualitas menurut Fathorrosjid (2005) antara lain:¹² (1) Iklim demokratisasi harus dimulai dari partai politik terutama yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam proses penjangkaran, penyaringan dan penetapan calon Kepala Daerah, (2) peraturan perundang-undangan yang dibuat, mencerminkan demokratisasi itu sendiri dan tidak anarki, (3) sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tidak tumpang tindih dan Kontaminatif (rancu) dalam peran dan fungsinya, (4) Pemerintah harus benar-benar Independen dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun, (5) Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa ditumbuh

¹⁰ Joko J. Prihatmoko. 2005. “Pemilihan Kepala Daerah Langsung”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 1-2.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 35-36.

¹² Irtanto.2008.“*Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 161

kembangkan, melalui pendidikan politik.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dinilai dari keberhasilan Kepala daerah terpilih dalam mengaktualisasi kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk kemajuan daerah demi terciptanya tatanan masyarakat yang madani, peranan Partai Politik pada Pemilihan Umum Kepala daerah menjadi fundamental mengingat fungsi partai politik diantaranya:¹³ (1) Komunikasi politik, (2) Sosialisasi politik, (3) Rekrutmen Politik, (4) Partisipasi Politik, (5) Pengatur Konflik.

Penelitian ini memfokuskan pada latar belakang kemunculan *protest voters* dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan *protest voters* pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bantul 2015, buruknya sistem rekrutmen politik yang dilakukan partai politik menciptakan kondisi terjadinya perbedaan politik di internal partai politik yang pada titik ekstrimnya adalah munculnya gerakan perlawanan yang disebabkan kekecewaan yang diterima disebabkan kepentingan-kepentingan publik harus dikesampingkan demi memuluskan kepentingan suatu golongan tertentu, hal ini tentu bertentangan dengan fungsi partai politik secara umum yakni menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh dukungan mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas maka diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.¹⁴

Kemunculan *protest voters* tentu berkaitan dengan teori deprivasi relatif, teori ini menjelaskan terjadinya suatu kesenjangan antara nilai yang diharapkan dengan nilai kapabilitas untuk memperoleh harapan, dengan kondisi demikian akan menimbulkan kekecewaan dan frustrasi, semakin tinggi tingkat kesenjangan akan semakin tinggi kekecewaan yang dirasakan yang akan berakibat munculnya tindakan melawan dan menimbulkan aksi-kasi masa.¹⁵ Kajian teori deprivasi relatif yang dicetuskan oleh Stouffler memfokuskan pada pengalaman individu dan kelompok dalam kondisi kekurangan (*deprivasi*) dan “kurang beruntung” (*disadvantage*). Sejalan dengan konsep diatas Davis mengembangkan konsep deprivasi relatif sebagai persepsi terhadap adanya perbedaan (*discrepancy*) antara kenyataan dengan harapan atau keinginan.¹⁶

¹³ Miriam budiarjo.2010.“*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 405-409

¹⁴ Hafied Cangara.2014.“*Komunikasi Politik -Konsep, teori, dan strategi-*”. Jakarta : Rajawali Press. Hal 165

¹⁵ <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39727.pdf> diakses Pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 05.00 WIB

¹⁶ Sarlito W.2009. “*Psikologi sosial*”. Jakarta : Salemba humanika. Jilid 1 Hal. 247

Dalam bukunya *Why Men Rebel* oleh **Ted Robert Gurr**, mengklarifikasikan Teori Deprivasi Relatif ke dalam tiga bagian utama, yakni :¹⁷ (1) *Decremental Deprivation* adalah kehilangan tentang apa yang dipikirkan yang seharusnya dimiliki. (2) *Aspirational Deprivation* terjadi karena kedua *values* tidak lagi sejajar disebabkan meningkatnya “*values expectation*” sedangkan “*values capabilities*” tetap. (3) *Progressive deprivation* yaitu deprivasi yang dimulai dengan kenaikan kedua *values* secara bersama-sama, tetapi pada suatu saat “*values Expectation*” terus meningkat sedangkan “*values capabilities*” justru menurun sehingga terjadi jarak antara kedua *values* yang makin lama makin besar.

Berdasarkan keadaan tersebut mengharuskan untuk melahirkan perlawanan yang bertujuan untuk merubah keadaan yang ada, gerakan perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka.¹⁸ Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau sosial movement, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.¹⁹

Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*).²⁰ (a) Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Scott mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: (1) organik, sistematis dan kooperatif, (2) berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, (3) berkonsekuensi revolusioner, dan/atau Keempat, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi, (b) Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: (1) Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, (2) Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, (3) Tidak berkonsekuensi revolusioner, (4) Lebih akomodatif

¹⁷ Tri dayaksini, et al. 2009. “*Psikologi sosial*”. Malang : UMM Press. cetakan 4 Hal. 202-203

¹⁸ Zaiyardam Zubir. 2002. “*Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*”. Yogyakarta: Insist Press. Hal. 19

¹⁹ Sidney Tarrow, *Power In Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*, Ed. 2 (New York, Ithaca: Cornell University Press, 1994), Hal.78

²⁰ James C. Scoot. 1981. “*Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*”. Jakarta: LP3ES. Hal. 69

terhadap sistem dominasi.

Perlawanan yang dilakukan secara masif ditujukan untuk menciptakan gerakan sosial yang bertujuan untuk: ²¹ (1) bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan, (2) adanya penggantian basis legitimasi, (3) perubahan sosial yang terjadi bersifat massif dan *pervasive* sehingga mempengaruhi seluruh masyarakat, (4) koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama. Sementara J. Smelser menyatakan, bahwa gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor yakni:²² (1) daya dukung struktural (*structural conduciveness*), (2) adanya tekanan- tekanan struktural (*structural strain*), (3) menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif, (4) faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu- isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan, (5) upaya mobilisasi orang- orang melakukan tindakan tindakan yang telah direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bentuk-bentuk perlawanan dan latar belakang kehadiran *protest voters* pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bantul. Penelitian ini dapat digunakan partai politik, individu atau kelompok yang berkeinginan menjadi aktor dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya bagi para *incumbent* sebagai bentuk pertimbangan dan evaluasi dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah serta dapat dijadikan referensi bagi partai politik dalam pengambilan suatu keputusan politis untuk menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini didapat dari sumber utama yakni aktor-aktor politik penggagas kelahiran protest voters dan partai politik pengusung petahana serta penyelenggara pemilu, data tersebut diperoleh melalui metode *semi structured group dan deep interview*. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi dari media maupun hasil ekspos penyelenggara pemilu.

2. Teknis Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Peneliti tidak memiliki

²¹ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim. 2001. "*Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*". Jakarta: Grasindo. Hal. 48

²² *Ibid.*,

otoritas untuk melakukan *treatment*. Peneliti bertugas untuk menganalisis mengorganisasikan temuan yang kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian adalah aktor-aktor yang terlibat dalam kelahiran *protest voters* dan aktor-aktor yang terlibat secara aktif dalam perkumpulan *protest voters* yang berasal dari internal kader-kader Partai pengusung petahana yakni PDIP Bantul. Pemilihan populasi ditujukan untuk menjawab alasan-alasan kelahiran protest voters dan mengetahui bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan protest voters yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi bagi setiap partai politik dalam pengambilan kebijakan politis penentuan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pemilihan Umum Daerah. Penentuan sampel dilakukan melalui *Snowball Sampling* yang memanfaatkan bantuan *key informan* untuk mengetahui secara rinci keterlibatan dan peranan-peranan aktor-aktor yang terlibat dalam *protest voters*.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, daerah tersebut dipilih karena dalam Pemilihan Umum Kepala daerah pada tahun 2015 terjadi proses yang diluar dugaan dengan gugurnya rezim petahana yang disertai lahirnya *protest voters*.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Pencalonan

Pemilikada Bantul pada tahun 2015 memiliki fenomena yang tak lazim terjadi yakni kehadiran kelompok protest voters yang bersumber dari internal partai pengusung petahana. Konflik kepentingan yang terjadi menyebabkan partai PDIP di kabupaten Bantul mengalami perpecahan di internal, perpecahan tersebut bermula pada perbedaan pandangan kader-kader PDIP terkait sosok calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang akan diusung oleh PDIP pada Pemilukada. Proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati bantul pada Pemilukada Bantul 2015 tidak berjalan harmonis karena terdapat dua kubu yang bersebrangan di internal kader-kader PDIP Bantul, terdapat dua kubu yang terbentuk kubu yang menginginkan kembali petahana maju sebagai calon bupati dan kubu yang menginginkan pergantian rezim dari petahana selanjutnya kedua kubu tersebut menamakan diri kubu pro perubahan dan kubu pendukung petahana. Terdapat dua faktor utama yang menjadi dasar bagi kader-kader pro perubahan

menginginkan pergantian rezim : (1) majunya petahana pada Pemilu pada Bantul 2010 diakui sebagai sebuah kecelakaan dan janji Drs. H. Idham Samawi kepada seluruh kader-kader pengusung petahana bahwa petahana yakni Hj. Sri Surya Widati diperuntukkan untuk satu periode saja, (2) Kader-kader pro perubahan berhasil menghimpun aspirasi yang berasal dari masyarakat dan kader-kader PDIP Bantul baik yang berada di struktural partai maupun di non-struktural mayoritas menyuarakan PDIP tidak lagi mengusung petahana.

Perpecahan di internal PDIP meruncing ketika terdapat kader-kader yang berada di struktural Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Bantul menginginkan petahana sebagai calon tunggal Bupati yang akan diusung oleh PDIP. Tantangan kader-kader pro perubahan tidak hanya harus berhadapan dengan rezim penguasa namun dihadapkan dengan persoalan lain yakni tidak ada sosok figur calon pemimpin yang berani untuk menjadi kompetitor petahana sebagai calon Bupati Bantul, selanjutnya kader-kader pro perubahan berinisiatif untuk mencari sosok figure yang dirasa mampu dan mau untuk berkekompetisi menjadi calon bupati bantul melawan petahana. Kader-kader pro perubahan yang berinisiatif aktif tersebut adalah Rajut Sukasworo, Sutanto Nugroho, Basuki Rahmat, Yulianto mendengar aspirasi dan isu-isu yang berkembang di tataran kader-kader PDIP maupun masyarakat, pada saat yang bersamaan ke empat tokoh tersebut mendengar isu bahwa pada tahun 2010 Suharsono berkeinginan maju sebagai Calon Bupati Bantul dari PDIP akan tetapi terkendala dua hal yakni : (1) Suharsono pada tahun 2010 masih menjabat di instansi kepolisian, (2) kekuatan keluarga petahana atau keluarga Drs. H Idham Samawi di internal PDIP begitu adidaya sehingga mengurungkan niat suharsono mendaftarkan diri untuk maju sebagai calon Bupati Bantul dari PDIP.

Pasca mengetahui isu tersebut ke empat kader pro perubahan yang disebut diatas berinisiatif melakukan pertemuan dengan Suharsono dengan membawa misi bahwa masyarakat Bantul dan mayoritas kader-kader PDIP menginginkan perubahan rezim kepemimpinan. Pasca melakukan komunikasi dan *lobby* yang cukup panjang akhirnya ditemukan sebuah kesepakatan Suharsono bersedia maju sebagai Bakal Calon Bupati Bantul dari PDIP. Persoalan selanjutnya berkaitan dengan rendahnya elektabilitas Suharsono, hal ini disebabkan sosok suharsono tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat Bantul khususnya di tataran mayoritas kader-kader PDIP karena Suharsono bukan merupakan kader PDIP dan suharsono yang memiliki latar belakang kepolisian selama bertugas tidak pernah bertugas di Kabupaten Bantul.

Langkah awal yang dilakukan oleh empat tokoh kader-kader pro perubahan adalah melakukan sosialisasi informal kepada kader-kader Partai dari tataran Ranting sampai DPC hal ini dilakukan karena sosialisasi yang dilakukan tidak tercantum dalam agenda partai. Sosialisasi tersebut memiliki dua tujuan yakni : (1) Mempertemukan dan memperkenalkan Suharsono dengan Kader-kader PDIP agar kader-kader PDIP mengetahui sosok suharsono secara mendalam, (2) Sosialisasi yang dilakukan bermaksud untuk melihat kelayakan suharsono dihadapan kader-kader PDIP. Pasca melalui mekanisme dan sosialisasi kader-kader PDIP pro perubahan bersama dengan mayoritas Pengurus Anak Cabang (PAC) dan pengurus ranting bermufakat dan menyetujui akan memunculkan nama Suharsono pada penjurangan Bakal Calon Bupati yang akan dilakukan oleh partai.

Pemilihan sosok suharsono dilandasi oleh 4 aspek fundamental : (1) Mentalitas Suharsono yang kuat, (2) : Suharsono merupakan putra daerah asli Kabupaten Bantul, (3) Latar belakang keluarga Suharsono berasal dari Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, (4) tidak ada keberanian dari partai-partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk bersaing dengan petahana. Kondisi politik menjelang pencalonan begitu dinamis dan dinamika internal PDIP akan mempengaruhi sikap-sikap partai politik lain hal ini dikarenakan ; (1) PKB sudah berkomitmen dengan petahana untuk mencari kompetitor bagi petahana, (2) partai-partai politik yang memiliki hak untuk mengusung calon Bupati Bantul tidak memiliki calon alternatif yang sepadan dengan petahana.

Tensi politik yang terus meruncing di internal PDIP berakhir ketika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengeluarkan surat intsuksi kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk melakukan penjurangan, proses penjurangan melibatkan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) yang berjumlah 17 yang bersumber dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Hasil dari penjurangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang dilakukan oleh DPCPDIP sebagai berikut :

Tabel 1.1

Hasil Rekapitulasi Calon Bupati/Wakil Bupati Bantul oleh PAC se-KAB. Bantul

No.	Jumlah Kecamatan	Nama Calon	Keterangan
1.	14 Kecamatan	AKBP Suharsono	Balon Bupati
2.	8 Kecamatan	Sri Surya Widati	Balon Bupati
3.	5 Kecamatan	Joko B Purnomo	Balon Wakil Bupati
4.	1 Kecamatan	Untoro Haryadi M,Si	Balon Bupati
5.	1 Kecamatan	Hanung	Balon Wakil Bupati

Sumber : Relawan Jas Merah 2015

Berdasarkan data penjangingan diatas menunjukkan bahwa keinginan akan perubahan kepemimpinan terus menguat dan bukan sekedar wacana, hal ini dibuktikan Suharsono memperoleh dukungan suara terbanyak yakni berjumlah 14 suara dari total 17 suara yang dapat dikumpulkan. Keinginan perubahan kepemimpinan tidak berhenti pada tataran Pengurus Anak Cabang akan tetapi sampai menjang ke Pengurus Ranting, total dukungan yang di peroleh Suharsono sebanyak 42 suara dari total 75 suara yang ada. Hasil penelitian penulis menemukan fakta bahwa terjadi politik intimidasi dan intervensi yang menyudutkan apabila Pengurus Ranting member dukungan kepada Suharsono yang dilakukan oleh kader-kader pro Petahana hal ini dilakukan bertujuan untuk ketakutan kader-kader pro petahana dukungan tersebut dapat mempengaruhi keputusan Dewan Pimpinan Pusat dalam mengeluarkan surat rekomendasi kepada petahana.

Kemunculan sosok petahana pada proses penjangingan tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh kader-kader pro petahana sesuai dengan instruksi yang diberikan Drs. H Idha Samawi bahwa Dewan Pimpinan Cabang harus memunculkan sosok calon petahana agar dapat mengikuti proses seleksi di Dewan Pimpinan Pusat, jika hal tersebut terjadi peluang kembali terpilihnya petahana sebagai bakal calon Bupati Bantul akan semakin besar karena kehadiran sosok Drs. H Idham Samawi di struktural Dewan Pimpinan Pusat PDIP, hal yang justru bertolak belakang dengan kondisi yang dialami oleh kader-kader pro perubahan bersama Suahrsono dikaenakan mereka tidak memiliki keterwakilan untuk memperjuangkan Suharsono.

Pasca proses penjangingan kader-kader pro perubahan yang berasal dari Pengurus Anak Cabang , Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting bermufakat membentuk sebuah sekretariat yang akan dijadikan sebagai posko pemenangan Suharsono, hal ini di tempuh dikarenakan kader-kader pro perubahan meyakini dengan jumlah dukungan yang berjumlah mayoritas surat rekomendasi yang diturunkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP akan teruntuk untuk Suharsono. Sekertariat tersebut diberi nama *Suharsono Center*, terdapat beberapa tujuan didirikannya *Suharsono Center* diantaranya : (1) untuk menaikkan elektabilitas Suharsono, (2) memberikan penegasan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP bahwa Suharsono memiliki basis masa dan mesin politik dalam menyambut Pemilukada Bantul 2015, (3) memberikan wadah bagi seluruh elemen masyarakat Bantul yang menginginkan perubahan kepemimpinan.

Momen yang dinanti akhirnya tiba yakni dikeluarkannya surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat terkait nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang akan diusung PDIP

pada Pemilu Pilkada Bantul 2015, akan tetapi berdasarkan surat rekomendasi yang turun nama yang muncul bukan Suharsono tetapi PDIP tetap mengusung petahana sebagai Calon Bupati Bantul pada Pemilu Pilkada Bantul 2015. Pasca turunnya surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP maka kader-kader pro perubahan yang tergabung dalam *Suharsono Center* bergerak cepat melakukan konsolidasi menanggapi surat rekomendasi yang diturunkan Dewan Pimpinan Pusat PDIP dengan menghasilkan beberapa keputusan : (1) Kader-kader pro perubahan tidak mempersoalkan keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP, (2) kader-kader pro perubahan mempersilahkan Suharsono maju sebagai calon Bupati Bantul melalui partai politik lain diluar PDIP, (3) posisi kader-kader PDIP pro perubahan tetap mendukung Suharsono akan tetapi berada diluar sistem.

Dinamika Pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pemilu Pilkada 2015 semakin dinamis pasca turunnya surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP hal ini justru menjadi babak baru bagi partai-partai politik lain yang belum menentukan sikap dan posisi pada Pemilu Pilkada Bantul 2015. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, PKS, PKB, dan PAN melakukan *manuver politik* untuk merangkul Suharsono sebagai calon Bupati Bantul yang nantinya akan dijadikan kompetitor bagi petahana. Setelah melalui proses *lobby* yang cukup panjang pada akhirnya diputuskan bahwa Suharsono akan di dampingi oleh Misbakhul Munir sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung oleh koalisi Merah Putih Bantul. Proses *lobby* yang dilakukan Gerindra sudah terjadi sejak Suharsono masih menjadi Bakal Calon Bupati Bantul yang akan diusung oleh PDIP akan tetapi karena keinginan Suharsono untuk dapat maju sebagai Calon Bupati Bantul melalui PDIP mengharuskan Gerindra menunda proses *lobby* tersebut.

Keberhasilan Suharsono menjadi Calon Bupati Bantul disebabkan beberapa faktor : (1) keterlibatan Drs. H Idham Samawi yang mendorong agar Gerindra mau mengusung Suharsono agar tidak terjadi Pemilu Pilkada Tunggal atau penundaan Pemilu Pilkada Bantul 2015, (2) Restu dan komitmen yang diberikan oleh kader-kader Pro perubahan terhadap Suharsono demi memutuskan rezim petahana, (3) kekuatan tekad Suharsono melanjutkan keinginan yang tertunda menjadi Calon Bupati Bantul. Akan tetapi proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di internal Koalisi Merah Putih meninggalkan sebuah kegaduhan dan perpeakan di internal Koalisi Merah Putih hal ini di karenakan sikap politik PAN yang memilih untuk abstain pada Pemilu Pilkada Bantul 2015, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor : (1) PAN merasa kecewa dan merasa

ditelikung oleh Gerindra dan PKS karena melanggar kesepakatan yang dibuat bersama yakni memperpanjang masa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul, (2) PAN tidak mungkin menciptakan poros baru karena akan memperkecil peluang runtuhnya rezim petahana, (3) Pasangan yang berkompetisi dinilai PAN tidak memiliki Visi-Misi untuk menyelesaikan permasalahan di Bantul, (4) sikap abstain PAN akan menguntungkan PAN karena dapat merapat kepada pasangan yang mendapatkan amanah rakyat Bantul. Pasca di daftarkannya Suahrsono melalui Gerindra dan PKB maka secara otomatis kader-kader PDIP pro perubahan meninggalkan *Suahrsono Center* dan berjuang diluar sistem dengan membentuk Relawan Jas Merah.

2. Partisipasi Kelompok-Kelompok Relawan

Fenomena menarik yang menjadi sorotan pada Pemilu Pilkada Bantul terletak pada terbentuknya beberapa relawan yang berasal dari Partai Politik, kejadian luar biasa tersebut terletak pada sikap partai politik yang menjadi asal para relawan tersebut, terdapat dua relawan yang akan dibahas pada penelitian kali ini karena dianggap memberikan dampak yang sangat signifikan dan terbentuk dari kejadian luar biasa di internal masing-masing partainya, kedua relawan tersebut adalah Relawan Jas Merah dan Gerbong Biru.

Kemenangan pasangan Harsono-Halim dalam kontestasi Pemilu Pilkada Bantul tidak dapat dipungkiri salah satu faktor utamanya adalah timbulnya perpecahan di internal PDIP Bantul. Pasca terbitnya rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pemilu Pilkada Bantul 2015, kader-kader pro perubahan memunculkan opsi untuk mencalonkan Suharsono melalui jalur perseorangan/independen akan tetapi hal tersebut tidak dapat di implementasikan mengingat dua faktor yakni : (1) Suharsono diyakini tidak memiliki dukungan dari parlemen yang seluruhnya berasal dari partai politik, (2) Membutuhkan jumlah biaya yang sangat besar. Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut kader-kader pro perubahan yang berada di Suharsono Center harus merelakan Suharsono maju menjadi calon Bupati Bantul melalui partai politik lain dan mengakhiri masa kerja Suharsono Center dan memulai perjuangan baru melalui pembentukan Relawan Jas Merah.

Proses kelahiran Jas Merah tidak dapat dipungkiri bersumber dari keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP kembali mengusung petahana, sehingga menempatkan kader-kader pro perubahan dalam keadaan yang cukup sulit dan dilematis akan tetapi berdasarkan keinginan dan aspirasi mayoritas kader PDIP dan rakyat Bantul yang menginginkan perubahan kepemimpinan di Bantul kader-kader pro perubahan tetap melanjutkan perjuangan untuk memutus rezim akan

tetapi berada diluar sisitem. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakngi lahirnya Jas Merah :

- (1) Pembentukan Jas Merah merupakan komitmen dari kader-kader pro perubahan dalam memperjuangkan aspirasi mayoritas masyarakat Bantul mengenai perubahan kepemimpinan,
- (2) Menyelematkan partai dari stigma negatif dengan berusaha membentuk dinasti politik,
- (3) kader-kader pro perubahan tidak bisa bersentuhan secara langsung dengan partai politik pengusung Suahrono karena alasan ideologis,
- (4) pembuktian terhadap partai bahwa keputusan partai merupakan sebuah kekeliruan.

Pasca terebentuknya Relawan Jas Merah, kader-kader pro perubahan terus ditempatkan pada pihak yang bersalah dan dianggap sebagai pengkhianat dan pembangkang oleh kader-kader pro petahana , tuduhan tersebut terbagi atas dua hal yakni : (1) Pembentukan Jas Merah dianggap sebagi bentuk ekspresi kekecewaan karena kader-kader pro perubahan tidak dilibatkan dalam kepengurusan kepartaian, (2) terdapat oknum terdidik diluar partai politik menggunakan politik adu domba untuk melemahkan PDIP dengan mengedepankan tawaran materialisme. Berdasarkan kedua tuduhan tersebut kader-kader PDIP pro perubahan merasa tidak dihargai dan diacuhkan dalam memperjuangkan kepentingan partai bersepakat membentuk Relawan Jas Merah untuk secara terbuka mendukung kompetitor petahana.

Makna pemilihan Jas Merah dapat diartikan “jangan sekali-sekali melupakan sejarah” hal ini bermaksud untuk mengingatkan kepada kader-kader pro petahan bahwa kader-kader pro perubahan memiliki jasa yang besar dalam membesarkan PDIP di Bantul selama ini, dari sisi keanggotaan Relawan Jas Merah berasal dari seluruh kader-kader PDIP pro perubahan yang secara sukarela mendukung dan menginisiasi terbentuknya Jas Merah untuk meruntuhkan rezim petahana. Pembentukan Jas Merah memiliki beberapa tujuan diantaranya : (1) memberikan wadah kepada kader-kader pro perubahan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat bantul (2) menjaga nama baik partai dari anggapan partai yang menginginkan dinasti politik, (3) menjaga agar kader-kader PDIP pro perubahan tidak Golput, (4) Perwujudan bentuk perlawanan kader-kader pro perubahan kepada keluarga petahana bahwa keputusan harus bersumber dari suara mayoritas, (5) pembuktiaan kepada masyarakat bahwa kader-kader PDIP tidak hanya mengabdikan kepada kepentingan partai semata, (6) Jas Merah akan menjadi penghubung antara pemerintah dengan konstituen PDIP.

Relawan Jas Merah dalam aktulisasi perlawanannya terhadap rezim terbagi atas dua hal yakni perlawanan tertutup dan perlawanan secara terbuka. Perlawanan terbuka yang dilakukan

dimaksudkan untuk mengubah sistem yang ada tanpa memperdulikan kepentingan pribadi dan bersifat revolusioner, wujud perlawanan terbuka yang dilakukan Jas Merah terbagi atas : (1) menolak mengikuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDIP terkait pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bantul dan memilih memihak serta mendukung kompetitor petahana, (2) turut secara aktif melakukan kampanye baik kampanye terbuka dan kampanye tertutup serta terlibat dalam proses pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yakni Harsono-Halim, (3) deklarasi dukungan secara terbuka dihadapan simpatisan Jas Merah dan media. Kegiatan yang dilakukan oleh Jas Merah menciptakan suasana kepanikan di internal pengusung petahana yang mengahruskan Drs. H Idham Samawi turut terlibat aktif dalam beberapa sesi kampanye dan perumusan strategi pemenangan petahana, hal ini tentu dapat ditinjau dari keberhasilan Jas Merah menyedot suara Petahana sebanyak 30 persen dari 70 persen pada Pemilu 2010 menjadi 47 Persen pada Pemilu 2015.

Sedangkan perlawanan tertutup bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pihak penguasa akan ketidakpuasan terhadap kebijakan penguasa, perlawanan tertutup di wujudkan dalam dua sikap yakni : (1) Jas Merah menutup akses komunikasi dengan kubu pro petahana, (2) tidak menggunakan atribut berupa lambang, bendera dan pakaian yang berkaitan dengan partai pengusung petahana. Kemenangan pasangan Harsono-Halim tidak terlepas dari keberhasilan Jas Merah dalam melakukan marketing politik untuk menaikkan simpatisme pemilih terhadap pasangan calon Harsono-Halim, terdapat beberapa strategi yang dilakukan Jas Merah dalam proses marketing politik Suharsono :

1). Menciptakan jargon politik yang mudah diterima masyarakat dan sampaikan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dikemas kedalam tema besar yang berbunyi “Mari Bergerak Bangkitkan Perubahan” yang kemudian mengangkat tiga poin utama (a) Pembentukan Dinasti Politik, (b) Praktek KKN, (c) Isu putera daerah asli Bantul.

2). Menjalankan mesin politik berupa kader-kader pro perubahan yang tersebar dari tataran Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten

3). Melakukan kampanye dengan gerilya agar tidak terdeteksi oleh tim sukses petahana lebih khusus oleh Drs. H. Idham Samawi, hal ini disebabkan 3 faktor utama : (a) mempertimbangkan aspek kekuatan dan nama besar Drs. H. Idham Samawi untuk meminimalisir intimidasi dan tekanan yang akan diberikan, (b) meminimalisir gesekan dengan kader-kader pro petahana, (c) memberikan rasa nyaman dan percaya diri kepada tim sukses petahana agar tebuai

dalam sikap arogansi dan keangkuhan.

4). Menciptakan sikap tidak berpuas diri dan memelihara semangat juang untuk meingkat dari hari ke hari sampai pada hari pencoblosan.

Sikap politik yang dilakukan oleh kader-kader pro perubahan memiliki konsekuensi berupa pengusulan pemecatan yang dilakukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul kepada Dewan Pimpinan Pusat akan tetapi hal tersebut di mendapatkan reaksi dari Dewan Pimpinan Pusat sehingga sampai saat ini status kader-kader pro perubahan masih merupakan kader PDIP.

Sementara itu dari sisi lainya terdapat suatu relawan yang menamakan diri Gebrong Biru yang memuat kader-kader PAN, terdapat beberapa alasan terbentuknya gerbong biru yakni :

(1) kekecewan kader-kader PAN yang pro perubahan karena sikap partai yang abstain sehingga menimbulkan masa mengambang atau *swing voters*,

(2) mayoritas kader-kader PAN pada tingkat kecamatan sepakat mendukung Suharsono yakni sebanyak 15 Dewan Pengurus Cabang dari total 17 Dewan Pengurus Cabang,

(3) keberhasilan tokoh-tokoh gerbong biru meyakinkan structural Dewan Pimpinan Daerah PAN Bantul untuk mendukung pasangan Harsono-Halim dengan bersyarat, terdapat beberapa persyaratan yang haru dipenuhi yakni; (a) Gerbong Biru tidak di izinkan menggunakan atribut PAN, (b) Gerbong Biru tidak diperkenankan memobilisasi kader-kader PAN dengan membawa struktural partai, (c) tidak kontrak politik dengan pasangan Harsono-Halim, (d) pasca Pemiluada Gerbong Biru harus membubarkan diri terlepas siapapun pemenangnya.

(4) Gerbong Biru mendapatkan restu dari tokoh penting PAN seperti Amien Rais dan Hanafi Rais untuk mendukung pasangan Harsono-Halim

(5) keberhasilan komunikasi politik yang dilakukan suharsono dalam merebut hati dan simpati kader-kader PAN yang tergabung dalam gerbong biru

3. Analisis Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pada sub bagian ini penulis akan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan kalahnya petahana, yang terbagi atas dua segmen yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang menjadi penyebab kalahnya petahana terbagi atas : (1) terjadinya perpecahan di internal partai pengusung petahana yakni PDIP, (2) Kesalahan fatal yang dilaukan oleh tim sukses petahana yang dilandasi kepercayaan diri yang berlebihan dan sifat angkuh terhadap konstituen, (3) Laporan tim sukses petahana yang tidak akurat dan tidak berdasarkan fakta yang

terjadi di lapangan, (4) kegagalan tim sukses petahana dalam proses marketing politik karena hanya mengedepankan dua keunggulan yakni anti Mall dan pencapaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam mengelola APBD, (5) ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP tidak memahami realitas sosial yang ada di tataran masyarakat dan tidak memiliki kemampuan menganalisa kelemahan dan kekuatan lawan politiknya.

Kemudian jika ditinjau dari aspek eksternal terbagi atas 3 hal yakni : (1) Kejenuhan yang dirasakan oleh masyarakat setelah dipimpin oleh petahana beserta keluarganya selama 15 tahun, (2) keberhasilan tim sukses Harsono-Halim dalam melakukan marketing politik yang menjatuhkan nilai tawar petahana di hadapan masyarakat, (3) Terjadi perpecahan di internal Nahdatul Ulama Bantul.

Pada aspek penyelenggara Pemilukada hampir tidak ditemukan kendala yang dapat mencoreng nilai-nilai demokrasi, sehingga penyelenggaraan pemilukada jika dilihat dari sudut pandang penyelenggara Pemilukada dapat dikatakan berhasil. Hal ini tentu tidak terlepas disebabkan beberapa faktor yang melandasi keberhasilan penyelenggara Pemilukada dalam hal ini adalah KPUD Bantul diantaranya ;

1). Penanaman nilai-nilai netralitas, profesionalitas, integritas dan komitmen terhadap penyelenggaraan Pemilukada yang berintegritas dan berkompeten keseluruh bagian penyelenggara Pemilukada mulai dari Komisioner KPUD, PPK, PPS, dan KPPS serta ditularkan dan di implementasikan di setiap bagian sekretariat KPUD Bantul.

2). Menolak secara tegas tawaran praktek-praktek kedekatan hubungan personal untuk mendahulukan kepentingan golongannya.

3). Melibatkan secara aktif dan efektif instansi-instansi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan Pemilukada seperti KPUD Provinsi, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Bupati Bantul, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bawaslu dan Panwaslu.

4). Sosialisasi mulai saat pendaftaran pasangan calon, pengenalan pasangan calon, dan pendataan Daftar Pemilih tetap dilakukan dengan masif, terstruktur dan variatif. KPUD Bantul merumuskan beberapa strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, strategi sosialisasi dibagi atas dua sektor yakni sektor darat yang terbagi atas (a) Segmentasi , dan (b) Kewilayahan, sedangkan sektor udara dilakukan dengan cara memnafaatkan media, media yang digunakan adalah : Radio, Televisi, Media Sosial, Website Resmi KPUD Bantul, Baliho, Spanduk, dan

Psoter.

5). Tidak terdapat Pelanggaran yang dapat merubah hasil Pemilukada karena pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran administrative yakni terdapat alat peraga kampanye yang dipasang oleh tim sukses petahana.

6). Penyusunan Daftar pemilih Tetap dilakukan secara rinci, terstruktur dan memnfaatkan kecanggihan teknologi serta melibatkan pemerintahan yang paling rendah yakni pedukuhan, tahapan penyusunan daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut : (a) memverivikasi dan memvalidasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran pemilih (SIDALIH), (b) DP4 kemudian diteruskan dengan melakukan pencocokan dan Penelitian (coklit) sesuai dengan keadaan nyata di masyarakat yang menjadi tanggung jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), (c) hasil yang diperoleh dari PPDP akan dijadikan acuan untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), (d) mekanisme terakhir untuk mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPUD menginstruksikan kepada PPK, PPS, dan PPDP untuk melakukan pemutakhiran data di wilayah kerjanya masing-masing.

7). KPUD tidak mendapat gugatan meski kekalahan diderita oleh petahana, hal ini disebabkan 3 faktor yakni : (a) Penyelenggara Pemilukada dari tingkat Komisioner KPUD sampai KPPS berhasil memegang teguh nilai-nilai independensi, netralitas, integritas dan imparialitas, (b) KPUD Bantul menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak dua kali KPPS dengan melibatkan seluruh anggota KPPS tidak hanya perwakilan dari masing-masing KPPS hal ini berdasarkan evaluasi pada proses penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2014, (c) adanya Scan C1 , C1 merupakan hasil perhitungan di tingkat TPS pada hari yang sama hasil tersebut dikirimkan ke KPUD Bantul untuk kemudian pada hari yang sama diunggah ke website KPUD Bantul sebagai bentuk transparansi, (c) Tidak terjadi penggelembungan suara dari tingkat pemungutan suara sampai di tingkat Kabupaten

8). Tidak terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilukada Bantul 2015 disebabkan penyelenggara Pemilukada menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

9). KPUD Bantul berhasil menaikkann angka partisiasi Pemilih jika dibandingkan dengan Pemilukada 2010 yang hanya sebesar 73,69 % sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 75,27 % dan dari ketiga Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilukada serentak 9 desember 2015

Kabupaten Bantul menempati posisi tertinggi jika dibandingkan dengan Sleman dan Gunung Kidul yang secara berurutan hanya mampu memperoleh persentase partisipasi pemilih sebesar 72,23 % dan 70,09 %.

KESIMPULAN

- a. Latar belakang terbentuknya *Protest Voters* bermula dari kecewaan di internal kader-kader partai yang disebabkan partai tidak mengedepankan aspirasi dari tataran bawah dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan kebijakan partai bersifat *Top Down* bukan *Bottom Up*.
- b. Keberhasilan *Protest Voters* dalam menghadirkan sosok calon penantang petahana pada Pemiluakada Bantul 2015
- c. Kelahiran *Protest Voters* mampu melemahkan kekuatan partai pengusung Petahana, sehingga mampu menurunkan suara petahana sebesar 30 persen jika dibandingkan dengan Pemiluakada sebelumnya
- d. *Protest Voters* melakukan gerakan sosial untuk menciptakan perubahan, gerakan sosial tersebut di implementasikan dalam bentuk perlawanan, Perlawanan yang dilakukan dibagi atas dua hal perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup
- e. Efektivitas gerakan Perlawanan *Protest Voters* dalam membaca dan menganalisis kekuatan internal *Protest Voters* dan Kelemahan lawan politik yang dijadikan strategi dalam proses marketing politik.
- f. Keberhasilan mobilisasi yang dilakukan *Protest Voters* ditunjukkan dengan bergeraknya mesin politik dari tingkat dusun, desa, kecamatan sampai kabupaten dalam menggalang dukungan untuk menjatuhkan rezim petahana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiarjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Henk Schulte Nordlote dan Gery Van Klinken 2009 . *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Obor.
- Heywood, Andrew. 2013. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sorensen, Georg. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gunawan, Jamil Dkk. 2005. *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zaman, Rambe Kamarul. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.

- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Nasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- J. Moleong, Leksi 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nashr Muhammad Al-Iman, Abu. 2004. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media
- Sekretariat Jendral Bawaslu Republik Indonesia. 2015. *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil*. Jakarta : Bawaslu RI
- Budiarjo, Miriam. 1994. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Azed, Abdul Bari. 2000. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Harris, Peter dan Reilly, Ben. 2000. *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar : Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*. Jakarta : International IDEA.
- Yusuf, Saifullah dan Salim, Fahrudin. 2000. *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi* Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
- J. Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- C. Macridis, Roy. 1998. *Pengantar sejarah, fungsi dan tipologi partai-partai*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik "Konsep, Teori, dan Strategi"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mufti, Muslim. 2013. *Teori-Teori Politik*. Bandung : Pustaka Setia
- Firmanzah. 2012. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- W.Sarlito. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Dayaksini, Tri. 2009. *Psikologi Sosial*. Malang : UMM Press
- Zubir, Zaiyardam. 2002. *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Sidney G. Tarrow. *Power In Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*. Sidney : Cornel University.
- C. Scoot, James. 1981 *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES.
- Sihbudi, Reza dan Nursalim, Moch. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*. Jakarta: Grasindo.
- P. Subagyo, Joko. 1997. *Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Subakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo

JURNAL, SKRIPSI, THESIS

Kristina. *Isu Strategis Dalam Penyelenggaraan Pilihan Kepala Daerah Langsung*. Dalam Jurnal Dinamika VOL. 5 NO.1. 2005

Mahendra, Akbar. 2014. *Budaya Politik Patrimonialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jeneponto*. Makasar : Universitas Hasanudin.

Bathoro, Alim. 2011. *Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Politik*. Jurnal FISIP UMRAH, Vol. 2, No. 2.

Marzuki. 2007. *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999*. Medan : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Fatturochman. 1998. *Psikologi Deprivasi Relatif Rasa keadilan kondisi psikologis buruh pabrik*. Jurnal: Psikologi Universitas Gajah Mada

REGULASI

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

INTERNET

<https://www.merdeka.com/peristiwa/suharsono-dari-tudingan-calon-boneka-hingga-menang-pilkada-bantul.html>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/656160-calon-bupati-bantul-tepis-tudingan-calon-boneka>

<http://kpud-bantulkab.go.id/berita/440-kpu-bantul-lakukan-sosialisasi-pencalonan-pilkada-2015>

<http://jogja.tribunnews.com/2015/08/25/pilkada-bantul-harsono-halim-nomor-1-ida-munir-nomor-2>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/656160-calon-bupati-bantul-tepis-tudingan-calon-boneka>

<http://www.harianjogja.com/baca/2015/08/10/pilkada-bantul-kampanye-partai-pendukung-dilarang-pakai-atribut-631657>

<http://daerah.sindonews.com/read/1027224/151/pan-merasa-ditelikung-gerindra-pks-1438140971>

<http://jogja.tribunnews.com/2015/06/18/sri-surya-widati-misbakhul-munir-diusulkan-jadi-pasangan-idam>

<http://m.metrotvnews.com/read/2015/10/02/437011>

<http://jaring.id/id/pilkada/dari-properti-ke-pelat-merah/>

http://www.rri.co.id/post/berita/223376/politik/kader_pdip_bantul_pecah_menjelang_pilkada_serentak_9_desember.html

<http://jogiatv.tv/kader-pdi-p-membelot-ke-pasangan-suharsono-halim/>

<http://www.radarjogja.co.id/giliran-pdip-diterpa-perpecahan/>

http://media.iyaa.com/article/2015/11/3430148_8618.html

<http://jogja.antaranews.com/berita/334482/laskar-dengan-dpc-ppp-beda-dukungan-pada-pilkada-bantul>